



Pengukuran Kinerja berdasarkan *Value For Money* pada Dinas Sosial Kabupaten Garut

Aulya Dini Fania¹; Marti Dewi Ungkari²; Cecep Hamzah Pansuri³

¹ Universitas Garut

24022115151@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

martiungkari@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

cecephamzah@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah metode *Value For Money* melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terlampir dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Garut dengan menggunakan metode *value for money* memperlihatkan hasil yang ekonomis, efisien berimbang, dan efektivitas berimbang.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja, *Value For Money*.

Abstract

The purpose of this research is to find out how the performance of activities carried out by Garut District Social Service. The method used by the writer is a descriptive analysis method with data collection techniques, namely library research and field research. Field research techniques are carried out with documentation and interviews. The data processing technique used is the Value For Money method through Activity Performance Measurement (Indonesian term "PKK") which is attached in the Government Agencies Performance Report (LKIP). The results showed that the performance of Garut District Social Service activities using the value for money method showed economic results, balanced efficiency, and balanced effectiveness.

Keywords: Performance Measurement, *Value For Money*.

1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Aziz, 2016)

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak terkendali disertai dengan penguasaan ekonomi secara tidak berimbang. Pertumbuhan ekonomi seperti ini akan melahirkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang lebih terbuka. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan masuknya arus investasi asing yang cenderung monopoli serta tidak menimbulkan mata rantai ekonomi baru (*multiplier effect*) yang dapat mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat bawah. Bila pertumbuhan ekonomi tidak dikendalikan oleh pemerintah secara ketat dan cenderung mengikuti arus pasar (*market mechanism*) serta hanya memberikan keleluasaan kepada investor dan pelaku ekonomi besar, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami fase kesenjangan pembangunan (*development gap*) (Hilmi Rahman Ibrahim, 2017)

Peran pajak dirasa semakin strategis terutama pada saat kondisi perekonomian yang semakin melemah. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya mengandalkan peran dari dirjen pajak maupun petugas pajak, akan tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan serta kesadaran bagi wajib pajak menjadikan faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan pun sudah jelas tertera mengenai kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi. (Dirjen Pajak, 2017)

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya meningkatkan peluang kerja, mengedukasi untuk membuka usaha sendiri atau menjadi *entrepreneur* agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk menjamin bahwa program yang telah dijalankan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja (Westi Riani, 2015).

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial Kabupaten Garut yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Diantara tugas nya yaitu: merumuskan kebijakan teknis bidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pelayanan kepada pengguna khususnya masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Masyarakat berhak mengetahui setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Garut. Dinas Sosial Kabupaten Garut merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki peran penting dalam perkembangan sosial di Kabupaten Garut. Dalam mewujudkan semua aspirasi dari masyarakat maka Dinas Sosial Kabupaten Garut memiliki beberapa program kerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka diperlukan pengukuran

kinerja. Pengukuran kinerja ini penting untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam merealisasikan program-programnya.

Adapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam mengungkapkan kinerjanya dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berdasarkan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dari hasil wawancara dengan bagian perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Garut menyatakan bahwa dalam pengukurannya belum menggunakan *value for money* untuk mengukur kinerjanya.

Menurut Mardiasmo dalam Alayyal Khikmah (2015), penerapan konsep *value for money* (VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai: 1) efektivitas pelayanan publik, 2) mutu pelayanan publik, 3) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan 4) meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang berdasarkan konsep VFM maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang direncanakan.

2.2 Value for money

Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. (Mardiasmo, 2009).

2.3 Kerangka Pemikiran

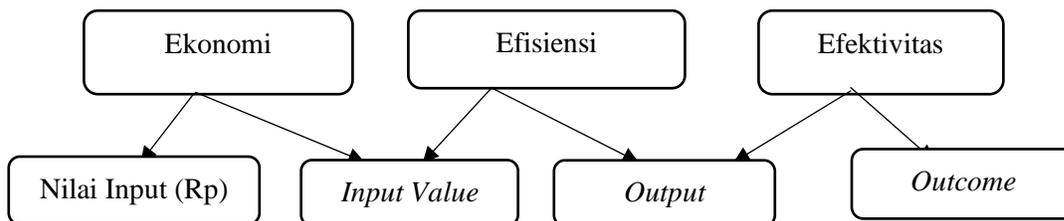
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Memberikan layanan sosial kepada masyarakat menjadi tujuan utama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penilaian atas capaian yang sudah dilakukan. Salah satu penilaiannya yaitu menggunakan pengukuran kinerja sektor publik dengan *Value For Money*. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan. (Mardiasmo, 2009)

Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. (Mardiasmo, 2009). *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Kriteria dari masing-masing elemen menurut Mahsun dalam Dwinanda (2018) adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi, yaitu jika nilai kurang dari 100% maka ekonomis, jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka ekonomi berimbang, dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka tidak ekonomis.
2. Efisiensi, yaitu jika nilai kurang dari 100% maka efisien, jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka efisien berimbang, dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka tidak efisien.
3. Efektivitas, yaitu jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka efektif berimbang, dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka tidak efektif.

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai *Value For Money* (VFM) dan pembahasan mengenai bagaimana indikator kinerja *value for money*, dirumuskan paradigma pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Skema *value for money*

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Garut yang dianalisis dengan berdasarkan *value for money*. Dimensi dari *value for money* yaitu pengukuran secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data diantaranya Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Berikut adalah cara pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Pengukuran Ekonomi

Dilakukan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran, dikalikan 100%. Adapun kriteria ekonomi menurut Mahsun (2006:187) yaitu:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis

b. Pengukuran Efisiensi

Adapun kriteria efisiensi menurut Mahsun (2006:187) yaitu:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka efisien

c. Pengukuran Efektivitas

Adapun kriteria efektivitas menurut Mahsun (2006:187) adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka efektif

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis *value for money* terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut yang menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, maka hasil pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

Pengukuran Ekonomi

Pada tahun 2012 dari perbandingan *input* dan nilai *input* seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut diperoleh hasil sebesar 99,97% sehingga dapat dikatakan ekonomis yang artinya Dinas Sosial Kabupaten Garut telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat. Namun dari 9 program yang telah direncanakan, hanya 8 program yang bisa terealisasi dengan baik, 1 program yang tidak terealisasi yaitu program pembinaan anak terlantar, dengan jumlah 32 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: ekonomis dengan jumlah 3 kegiatan (9,4%), ekonomi berimbang dengan jumlah 29 kegiatan (90,6%) dan tidak ekonomis dengan jumlah 0 kegiatan (0%)

Pada tahun 2015 dari perbandingan *input* dan nilai *input* seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut diperoleh hasil sebesar 90% sehingga dapat dikatakan ekonomis yang artinya Dinas Sosial Kabupaten Garut telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat. Dari 8 program yang direncanakan semuanya terealisasi dengan baik, total semua kegiatan yaitu 29 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: ekonomis dengan jumlah 11 kegiatan (37,94%), ekonomi berimbang dengan jumlah 18 kegiatan (62,06%), dan tidak ekonomis dengan jumlah 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2016 dari perbandingan *input* dan nilai *input* seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut diperoleh hasil sebesar 90% sehingga dapat dikatakan ekonomis yang artinya Dinas Sosial Kabupaten Garut telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat. Namun dari 10 program yang direncanakan hanya 5 program yang terealisasikan, sedangkan 5 program lagi tidak terlaksana. Program yang tidak terlaksana diantaranya yaitu:

1. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
2. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

3. Pembinaan Anak terlantar
4. Keserasian sosial
5. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan

Terjadinya banjir bandang di Garut pada bulan September menjadikan salah satu penyebab tidak terlaksanakannya program yang sudah direncanakan, selain itu ada program tambahan yang dimasukkan ke dalam laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan yaitu program pemenuhan dasar pengungsi. Total semua kegiatan yaitu 21 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: ekonomis dengan jumlah 6 kegiatan (28,58%), ekonomi berimbang dengan jumlah 15 kegiatan (71,42%), dan tidak ekonomis dengan jumlah 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2017 dari perbandingan input dan nilai input seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut diperoleh hasil sebesar 90% sehingga dapat dikatakan ekonomis yang artinya Dinas Sosial Kabupaten Garut telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat. Dari 7 program yang direncanakan semuanya terealisasi dengan baik, total semua kegiatan yaitu 33 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: ekonomis dengan jumlah 14 kegiatan (42,43%), ekonomi berimbang dengan jumlah 19 kegiatan (57,57%), dan tidak ekonomis dengan jumlah 0 kegiatan (0%). Namun terdapat 3 penambahan program yang dilaksanakan yaitu:

1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
2. Pelestarian nilai-nilai kejuangan kepahlawanan
3. Program rehabilitasi sosial

Dalam pengukuran ekonomi pada tahun 2012, 2015, 2016 dan 2017 telah menunjukkan hasil yang cukup optimal. Dengan alokasi dana yang telah dianggarkan Dinas Sosial Kabupaten Garut telah menggunakannya secara ekonomi berimbang. Artinya bahwa alokasi dana untuk setiap kegiatan sudah digunakan sebagai mana mestinya, perbandingan antara *input* dengan *output* hasilnya sama dengan 100%. Menurut (Mardiasmo) suatu kegiatan dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Menurut Kusufi dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan.

Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2012, 2015, 2016 dan 2017 dalam menggunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal. Pada tahun 2012 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 32 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 3 kegiatan (9,4%), efisiensi berimbang sebesar 29 kegiatan (90,6%), tidak efisien sebesar 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2015 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 39 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 11 kegiatan (37,94%), efisien berimbang sebesar 18 kegiatan (62,06%), tidak efisien sebesar 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 21 kegiatan,

menunjukkan hasil efisien sebesar 6 kegiatan (28,58%), efisien berimbang sebesar 15 kegiatan (71,42%), tidak efisien sebesar 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 33 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 14 kegiatan (42,43%), efisien berimbang sebesar 18 kegiatan (54,54%), tidak efisien sebesar 1 kegiatan (3,03%).

Dalam pengukuran efisiensi pada tahun 2012, 2015, 2016 dan 2017 telah menunjukkan target hasil yang baik. Dengan menggunakan anggaran yang ada dan perolehan hasil yang cukup efisien, Dinas Sosial Kabupaten Garut secara keseluruhan telah menunjukkan efisiensi berimbang atau dapat dikatakan sama dengan 100% dalam pencapaian kerjanya. Menurut Mardiasmo (2009) semakin besar *output* dibanding dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisien suatu organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (Mahmudi, 2007).

Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2012, 2015, 2016 dan 2017 dalam menggunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal. Pada tahun 2012 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 32 kegiatan, menunjukkan hasil efektif berimbang sebesar 100%

Pada tahun 2015 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 39 kegiatan, menunjukkan hasil efektif berimbang sebesar 100%.

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 21 kegiatan, menunjukkan hasil efektif berimbang sebesar 100%.

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Sosial pada misi memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 33 kegiatan, menunjukkan hasil efektif berimbang sebesar 96,97% dan tidak efektif sebesar 3,03%.

Dalam pengukuran efektivitas pada tahun 2012, 2015, 2016, dan 2017 telah menunjukkan hasil pencapaian target yang ditetapkan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Garut telah mencapai tujuannya, walaupun dalam pengukurannya telah menunjukkan efektivitas berimbang, yang artinya sama dengan 100%. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2009). Menurut Kusufi, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut tahun 2018 mendapat kriteria kurang patuh, sedangkan masing-masing kriteria kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kepatuhan formal dan material, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perundang-undangan, sebagai berikut

1. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kepatuhan formal dan mendapat kategori baik atau patuh, hal ini dikarenakan semua wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan seperti mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kesadaran wajib pajak mendapat kategori kurang patuh, hal ini diakibatkan dari faktor kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara belum disadari sepenuhnya oleh wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek pemahaman peraturan perundang-undangan dikategorikan tidak patuh, faktor Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang baik.

Dengan menerapkan konsep kinerja berdasarkan *value for money* Dinas Sosial Kabupaten Garut dapat mengetahui pengelolaan anggaran serta kinerja dan dapat melakukan pengendalian dalam program dan kegiatan yang dilakukan. Maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Garut

Dapat lebih menekankan kembali biaya yang dikeluarkan dan dipergunakan, mendahulukan kegiatan prioritas yang akan dikerjakan, mencari alternatif lain yang lebih hemat biayanya, sehingga dapat mempertahankan tingkat ekonomis dan menghemat pengeluaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dianggarkan telah mencapai ekonomis berimbang atau sama dengan 100%, namun belum mencapai ekonomis yang rasionya kurang dari 100%. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dimasa yang akan datang. Pencapaian yang Dinas Sosial Kabupaten Garut raih belum sepenuhnya efisien dan efektif, menunjukkan hasil yang berimbang. Dan melakukan peningkatan kembali terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program dapat dilampirkan semua aspek sehingga memperkuat bukti kepada masyarakat bahwa program dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh seluruh data yang akan digunakan dan dapat menggunakan metode lain dalam pengukuran *value for money*, misalnya menyebar angket/quisioner kepada masyarakat, tidak hanya dengan menganalisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta wawancara saja, agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi, sehingga dapat lebih teruji. Dan diharapkan juga penelitian selanjutnya dapat berkembang tidak hanya menganalisis suatu organisasi menggunakan *value for money* yang mengandung tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi bisa juga ditambah dengan menganalisis kinerja organisasi dengan menambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*).

Daftar Pustaka

- Aziz S. (2016). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. I-Economic Vol. 2. No.1.
- Dwinanda. (2018). Analisis *Value For Money* dalam pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Hilmi. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol.40, No.55
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan.
- Khikmah, A. (2015). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan konsep Value For Money.
- Mahmudi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Riani, W. (2015). Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Vol.4.No.1.
- Sasti, Ika, F. A. (2012). Penilaian Kinerja dengan Menerapkan Indikator *Value For Money* pada Kantor Pertahanan Kabupaten Muri Banyuasin tahun 2009-2011.